

**ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN
KENDERAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA AMBON**

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Magister**

**PROGRAM STUDI
EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MONTGOMERY WARBAL

P 0700203515

Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASAR

2007

ABSTRAK

Montgomery Warbal, Analisis Pengelolaan Retribusi Perparkiran Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon (Dibimbing oleh DR. M.M. Papayungan, SE, M.A dan Dra. Ny. M. K. Tupamahu, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manajemen pengelolaan pemungutan retribusi parker dalam mencapai sasaran yang direncanakan dengan menentukan strategi Kota Ambon Propinsi Maluku. peningkatan retribusi parkir ditepi jalan umum untuk peningkatan kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Amboin.

Data yang dikumpulkan melealui responden yang terdiri dari para petugas parkir atau kolektor serta para pegawai Dinas Perhubungan Kota Ambon, dianalisis dengan metode deskriptif melalui teknik analisis SWOT untuk menentukan strategi pengelolaan yang tepat sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di kota Ambon mengalami penurunan tidak mencapai target, hal tersebut karena kinerja Dinas Perhubungan Kota Ambon, para Kolektor dan petugas pelaksanaan pemungutan retribusi.parkir di tepi jalan umum tidak efektif. Selanjutnya berdasarkan analisa SWOT ditemukan strategi dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi parkir berupa perbaikan infrastruktur pada areal parkir dan peningkatan mutu pelayanan di lapangan. Oleh karena itu disarankan untuk memberlakukan system voucher parkir dalam wilayah kota dan melakukan perhitungan target yang tepat dari potensi parkir yang ada di wilayah Kota Ambon

TESIS

ANALISA PENGELOLAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA AMBON

Disusun dan diajukan oleh :

MONTGOMERY WARBAL
Nomor Pokok PO700203515

Telah dipertahankan didepan Panitia ujian Tesis
Pada tanggal Februari 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat

DR. M.M. Papayungan, SE, M.A
Ketua

Dra. Ny. M. K. Tupamahu, M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin

DR. Hj. Rahmatiah Zein, SE, MA

Prof. Dr. dr Razak Thaha, M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat serta mencapai tujuan terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Selanjutnya hasil-hasil pembangunan ini dapat dinikmati secara merata dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sebenarnya secara umum tiap negara selalu ingin mencapainya melalui tiga tujuan kebijakan. Untuk negara Indonesia dikenal Trilogi Pembangunan yaitu : (1) pertumbuhan ekonomi yang cepat, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan nasional maupun pendapatan perkapita; (2) Pemerataan pendapatan atau secara lebih luas adalah kenaikan ekonomi dan (3) Kestabilan ekonomi yang ditandai dengan stabilitas harga dan rendahnya angka pengangguran (Latief,2001)

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi terasa semakin memacu daerah untuk dapat lebih mampu berusaha secara lebih efektif dan efisien mungkin dalam berusaha serta berkompetisi guna mengembangkan berbagai potensi penerimaan daerah disatu sisi dan sekaligus demi mempercepat proses pembangunan secara umum maupun pembangunan ekonomi secara khusus di sisi lainnya. Hal ini di dukung dengan karakteristik tiap wilayah yang berbeda satu dengan lainnya baik secara geografis, maupun kultur budaya dan sumberdaya alam yang tersedia, menjadikan tiap daerah akan bertumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan/kemampuan perolehan penerimaan daerah itu sendiri. Atau dengan kata lain berdasarkan perbedaan tersebut, maka setiap daerah harus memiliki kebijaksanaan tersendiri dalam kegiatan

perencanaan maupun, pelaksanaan pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonominya agar tidak tertinggal dari daerah lainnya.

Sejalan dengan keterbukaan perekonomian secara global yang merupakan peluang sekaligus tantangan, maka setiap daerah dalam upaya melangkah kedepan akan bersaing dan berusaha menciptakan keseimbangan dalam kebersamaan guna mempercepat proses pembangunan daerah itu sendiri. Kondisi ini mengisyaratkan ketersediaan kekayaan dan eksploitasi terhadap sumberdaya daerah, semestinya dapat menumbuh kembangkan pertumbuhan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlu adanya kesadaran bahwa kegiatan pembangunan tidak dapat berjalan sendiri dan dilakukan oleh sepihak saja sebagai subjek maupun objek pembangunan, tetapi perlu adanya kerjasama pihak antara Pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta secara bersama-sama dalam merancang, serta melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal ini maka diperlukan berbagai upaya perencanaan yang mantap, karena melalui perencanaan diharapkan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan lebih efisien.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam wujud perubahan – perubahan yang terencana pada berbagai aspek kehidupan bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan kelembagaan yang tersedia baik sekarang maupun yang akan datang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dijabarkan melalui kegiatan – kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara tepat, maka pemerintah menerapkan strategi perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penekanan

pada pentingnya memacu pembangunan sektor – sektor yang dianggap potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, dalam arti bahwa sektor itu dapat diharapkan menjadi lokomotif pembangunan terhadap sektor lainnya. Hal ini searah dengan tujuan dari kebijaksanaan pembangunan yang antara lain ; untuk mencapai pendapatan perkapita yang cepat, menyediakan kesempatan kerja yang cukup, mengusahakan adanya pembagian pendapatan yang lebih merata, mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan yang lainnya serta untuk merubah struktur perekonomian menjadi seimbang.

Otonomi Daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Konsekuensi dari diberlakukannya undang – undang tersebut adalah beban tugas pemerintah daerah kabupaten /kota, partisipasi masyarakat semakin besar, penggalian potensi ekonomi daerah harus lebih maksimal dan digunakan dengan sebaik mungkin, dengan demikian kegiatan mulai dari merencanakan, mengatur, membiayai dan mengevaluasi segala aktivitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat serta peraturan – peraturan yang berlaku.

Langkah pemberdayaan dan penciptaan pemerintah daerah yang kuat berdasarkan undang – undang tersebut serta memenuhi tuntutan reformasi dan perkembangan global. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek seperti kelembagaan ,ketatalaksanaan , pengawasan, serta sumber daya manusia. Peninjauan pada aspek kelembagaan dapat dimulai dengan pengorganisasian aparatur pemerintah yang bersih jujur dan berdedikasi dalam menanggulangi serta mengelola aset-aset penerimaan sebagai wujud perolehan pendapatan daerah. Sejauh mana perolehan penerimaan daerah ini akan diterima tergantung pada seberapa besar

sumber-sumber penerimaan tersebut dapat dikelola dan diatur secara baik dan tersistim dalam suatu pengorganisasian yang bersih jujur dan berkelanjutan.

Menurut wijaya (1992) ada beberapa tolakukur yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam berotonomi dan untuk itu kemampuan Daerah dibagi dalam beberapa variabel yang salah satu diantaranya adalah kemampuan pendapatan asli daerah /keuangan daerah. Hal yang dikemukakan oleh Wijaya tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karena dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, pemerintah daerah memerlukan dana yang sangat besar. Dalam Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antar pemerintah pusat dan daerah disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD yang salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah dimana unsur utama adalah pajak daerah .Kondisi sekarang sangat berbeda dimana dana alokasi umum (D A U) dan dana alokasikhusus (DAK) tidak sebesar anggaran pemerintah orde baru, untuk hal itu kemampuan daerah menggali hasil potensi keuangan dan ekonominya benar – benar diperlukan

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati – hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Aspek ini menjadi penting karena merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dan menduduki posisi sentra dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menggali dan meningkatkan sumber –sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan

pemerintah dan pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD) . Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi sumber daya dan sarana yang tersedia atau memungkinkan serta berbagai upaya meningkatkannya secara lebih efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta berupaya menggali sumber – sumber pendapatan baru yang potensi memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Undang – undang No.25 Tahun 1999 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuaidengan peraturan perundang – undangan.

Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis memberikan peluang dan kesempatan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan retribusi. Unsur-unsur penerimaan retribusi sendiri terdiri dari berbagai bentuk dan kategori seperti misalnya bagian pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN serta pos lain-lain dari PAD. Disamping itu terdapat pula berbagai dana perimbangan pinjaman daerah serta pos lainnya yang sah. Dari pos retribusi sendiri terdapat berbagai penerimaan retribusi seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi pemakaman, retribusi parkir ditepi jalan umum serta lainnya.

Berdasarkan gambaran data yang diperoleh ternyata sumbangan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan daerah cukup menjanjikan bahkan ada kecenderungan menaik dari tahun ke tahun seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Perkembangan Retribusi dan PAD
Kota Ambon Tahun 2001-2995

Tahun	RETRIBUSI		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2001	868.487.000.00	580.875.110.00	2.816.719.000.00	1.734.665.248.66
2002	992.785.110.00	1.172.392.985.00	4.560.564.000.00	5.506.062.388.06
2003	3.195.151.339.00	3.818.045.924.00	8.421.863.895.00	8.783.407.610.00
2004	4.559.761.739.00	4.146.654.095.00	10.449.416.762.00	11.041.137.082.50
2005	4.993.086.720.00	5.728.625.242.00	11.810.744.373.00	13.334.603.623.71

Sumber : DisPenDa Kota Ambon.

Gambaran ini menunjukkan terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ketahun dengan jumlah penerimaan dari retribusi secara umum juga mengalami peningkatan yang cukup tajam. Walaupun demikian besar jumlah sumbangan retribusi perparkiran belum seberapa dibandingkan dengan sumbangan retribusi yang lainnya. Sebagai salah satu sumber penerimaan retribusi daerah Kota Ambon maka retribusi perparkiran dirasakan masih dapat ditingkatkan hasil penerimaannya.

Retribusi perparkiran kendaraan bermotor merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang keberadaannya dan sistem pengelolaan dan sistem pemungutan dirasakan belum optimal dikarenakan terjadi konflik sosial di kota Ambon. Untuk itu pemerintah kota kembali berusaha mengoptimalkan retribusi parkir kendaraan bermotor dengan sistem pengelolaan diberikan kepada pengusaha, koperasi pada lajur-lajur tertentu terutama untuk daerah/lokasi dengan tingkat efektivitas masuk keluar kendaraan yang ramai. Berdasarkan data yang diperoleh serta pengamatan terlihat bahwa tingkat penerimaan retribusi parkir masih belum optimal dibandingkan dengan luas lahan parkir yang tersedia. Disamping terdapat perbedaan yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan retribusi tersebut. Hal ini tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel .2
Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir
Kota Ambon
Periode 2001-2005

Tahun	Target	Realisasi
2001	14.130.000.00	1.525.500.00
2002	90.450.000.00	64.122.500.00
2003	232.470.000.00	123.875.400.00
2004	123.975.000.00	32.110.375.00
2005	125.100.000.00	69.229.660.00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon..

Hal ini berarti penerimaan daerah yang berasal dari sumber retribusi perpajakan menggambarkan kondisi yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi ini jika dibandingkan dengan besarnya wilayah perpajakan yang semakin menjamur dan bahkan meluas untuk beberapa wilayah di daerah Kota Ambon masih merupakan bagian kecil saja. Perbedaan besar/luasnya wilayah perpajakan dengan besarnya penerimaan yang diperoleh merupakan hal prinsip yang perlu diketahui dan ditindak lanjuti.

Kondisi ini diharapkan dapat dirubah searah dengan semakin kondusifnya Kota Ambon dan berbagai upaya yang digalakkan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan yang menata sumber-sumber penerimaan retribusi yang berkaitan dengan masalah perhubungan. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman yang telah lewat bahwa sistem pengelolaan berjalan agak tersendat karena kurangnya kontrol secara langsung terhadap sumber penerimaan dimaksud. Untuk kedepan diharapkan paradigma yang membiarkan sumber-sumber penerimaan daerah terabaikan semakin dirobah .

Alur pengelolaan sumber penerimaan retribusi perpajakan ini yang akan dikaji lebih mendalam untuk mekanisme manajemen pengelolaan yang selama ini dilakukan yang merupakan penyebab kurangnya sumbangan retribusi perpajakan terhadap retribusi daerah yang sekaligus merupakan bagian sumbangan kepada

Pendapatan asli Daerah. Selain itu pertimbangan bahwa potensi perparkiran dikota Ambon masih cukup besar. Dimana potensi tersebut apabila dilihat dari aspek ekonomi masih dapat lebih ditingkatkan lagi sekaligus dapat memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah dalam membantu penambahan pemasukan pendapatan asli daerah Kota Ambon.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang disimpulkan beberapa masalah sekaligus merupakan pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir efektif atau tidak efektif terhadap kontribusi penerimaan retribusi daerah.
2. Seberapa besar penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon serta faktor – faktor penyebabnya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan dan perkembangan pengelolaan dan pemungutan retribusi perparkiran di tepi jalan umum Kota Ambon.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah serta faktor-faktor penyebabnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang ekonomi perencanaan pembangunan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Ambon umumnya dan dinas perhubungan kota Ambon khususnya dalam menyusun strategi pengelolaan retribusi parkir yang selanjutnya merupakan sumber peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Sebagai referensi bagi penelitian lain yang mungkin berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian

Mappelawa (2003) dalam penelitian yang berjudul Strategi peningkatan retribusi parkir dalam rangka penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sinjai, dengan melihat variable yang diteliti potensi retribusi parkir yakni kendaraan, lokasi dan waktu pemungutan retribusi parkir diukur dari besarnya tingkat penerimaan, biaya operasional dan target yang optimal. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aspek perencanaan penerimaan retribusi parkir belum didasarkan pada potensi parkir yang ada. Perlu adanya peningkatan kinerja petugas dari dinas perhubungan dalam pelaksanaan pemungutan parkir dan pengawasan dilakukan terhadap penarikan retribusi parkir. Selanjutnya Mappelawa menyarankan pula bahwa pemerintah harus menempatkan personil pengelola dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, harus erkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, harus memberikan honor/tunjangan kepada petugas pengelola parkir sehingga menghindari penyelewengan yang terjadi, dan perlu meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa parkir.

Yamin (2000), dalam penelitiannya yang berjudul efektivitas pengelolaan perparkiran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menganalisis variable pengelolaan perparkiran yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan perparkiran yang terdiri atas target penguatan yang tidak riil, kedisiplinan masyarakat pengguna jasa, penegakan hukum, penyempurnaan titik parkir. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa target penguatan yang tidak riil dipengaruhi oleh variabel perencanaan dan pengawasan.

Selanjutnya Mongunsidi (2002) tentang pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bore, menemukan adanya perbedaan antara target dan realisasi dimana penyebabnya adalah kemampuan aparat didalam melakukan pendataan potensi yang tidak realistis, selain itu juga penetapan target tidak sesuai potensi yang ada.

Dari beberapa hasil penelitian diatas terlihat bahwa variabel yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD adalah Variabel manajemen pengawasan (*law enforcement*), pendataan potensi dan penetapan target yang riil (perencanaan). Sehubungan dengan penelitian upaya pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ini, maka penelitian ini lebih menekankan pada aspek Manajemen Pengelolaan, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi perpajakan dalam mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kota Ambon dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Pengertian Retribusi Daerah.

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi. Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau badan.

Retribusi (Bea) Daerah adalah suatu pungutan daerah , yang diperuntukkan sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atau untuk memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik jasa

yang langsung maupun jasa yang diberikan secara tidak langsung (Riwukoho, 1988:42).

Berbeda halnya dengan pajak, retribusi mempunyai hubungan langsung dengan kontraprestasi yang diberikan oleh daerah karena pembayaran tersebut memang secara khusus dimaksudkan untuk mendapatkan suatu prestasi dari Negara yang dapat dinikmati secara perorangan. Pengenaan retribusi didasarkan pada peraturan – peraturan yang berlaku umum, dimana pelaksanaan pemungutannya bersifat ekonomis, artinya pihak-pihak yang bersangkutan bebas untuk membayar atau tidak, tetapi bilamana tidak membayar, maka mereka tidak akan mendapat fasilitas tertentu dari Negara atau Daerah.

Dalam rangka pemngutan retribusi daerah tersebut, Kristiadi (1985 :32) mengemkkan beberapa hal yag sangat penting yaitu :

1. Adanya pelayanan yang secara langsung diberikan sebagai imbalan dari pungutan yang dikenakan.
2. Adanya kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Harga pelayanan atau angkos pelayanan yang tidak melebihi pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Abdulrahman (1985: 47) mengemukakan bahwa retribusi merupakan bagian terbesar dari sumber – sumber pendapatan asli daerah yang perlu dikelola secara lebih baik agar pemakai jasa merasa puas terhadap layanan yang diberikan . Karena tujuan utama terhadap pemungutan retribusihana diperlukan kepada masyarakat pemakai jasa atau fasilitas yang dikelola oelh pemerintah daerah.

Sementara Widjaja (1992: 80), mengatakan bahwa retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung (*cost recovery*) dari pemerintah daerah dengan

memperhatikan kualitas pelayanannya harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai dengan besarnya retribusi yang ditarik/ di pungut.

Binder (1987: 124) mengatakan bahwa retribusi adalah ikatan bagi setiap orang yang telah menggunakan jasa baik kepada daerah maupun pada suatu lembaga yang telah terikat pada suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang –perorang bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut.

Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*) yaitu perubahan /penambahan biaya untuk melayani setiap penambahan konsumsi yang terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi jika pemerintah menetapkan harga layanan bersangkutan seolah - olah

Pada kondisi pasar bersaing , dan memproduksi jasa itu dititik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (*marginal revenue*) dan selanjutnya menekan harga dengan *marginal cost* atau bahkan menerapkan *Average Cost Pricing* . Harga ini akan menentukan tingkat permintaan sehingga sesuai dengan penawaran, dan akan memberikan isyarat dia tas sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan penawaran dinaikan sesuai dengan permintaan.

Burhanuddin (1995: 9) mengatakan retribusi sebagai pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa dan fasilitas yang diberikan oleh

pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi daerah sebagai salah satu elemen pemasok utama terhadap pendapatan asli daerah, memiliki peranan yang sangat urgen dalam rangka mendinamisasikan gerak lajunya pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitan tersebut, maka untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari komponen retribusi daerah diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dan aparat pemerintah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target retribusi daerah merupakan perwujudan tingkat kesadaran antara masyarakat pemakai dengan unsure aparat pengelola retribusi. Untuk itu keterpaduan antara kedua unsur yaitu antara pemakai jasa dengan aparat pengelola (*pelaksana*) harus diperhatikan terutama dalam penentuan lebih realistis dan sesuai dengan potensi retribusi yang ada.

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Retribusi di bagi dalam tiga golongan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggelongan jenis retribusi tersebut dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam peneapan sector retribusi yang ditentukan dalam pasal 21 Undang – Undang Pajak Daerah tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, berdasarkan perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2002, sebagai berikut :

- a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara
- b. Tempat parker umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu- rambu lalu lintas dan tempat – tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parker umum dan

dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

- c. Tempat parkir khusus adalah tempat yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, orang atau badan yang meliputi pelataran lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya.
- d. Tempat parkir insidental adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
- e. Petak parkir adalah bagian – bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
- f. Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir.
- g. Rambu parkir adalah tanda – tanda yang menunjukkan tempat – tempat parkir yang ditunjuk.
- h. Kendaraan adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih baik motor maupun tidak bermotor.
- i. Retribusi tempat parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir.
- j. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan atau menikmati jasa pelayanan parkir.
- k. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang meliputi :
 - > di tepi jalan umum yang diizinkan
 - > pelataran/ lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi pemerintah daerah.

- > halaman pertokoan
- > taman parkir
- > gedung parkir, dan
- > tempat – tempat lain yang sejenis.

1. Subjek retribusi adalah setiap yang memanfaatkan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus.

3. Pengertian Pengelolaan

Keberhasilan pada berbagai bidang usaha yang dilakukan baik pada unit organisasi pemerintah maupun pada unit organisasi swasta dan perorangan tentunya tidak terlepas dari pada bidang keahlian dan profesionalisme unsur pelaksana (aparatur pelaksana) tersebut. Seperti halnya efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di kota ambon sangat ditentukan oleh kemampuan aparat pelaksana dalam menggali berbagai potensi sumber pajak dan retribusi serta sumber-sumber lain yang sah.

Hamalik (1993: 18) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat ketenagaan, organisasi pelaksana pengendalian dan penilaian yang saling berhubungan, pengaruh-mempengaruhi, ketergantungan dan saling terobos satu sama lain dalam rangka penyediaan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Pengelolaan ini merupakan bagian dari proses manajemen, karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik. Mampu mengorganisasikan suatu pekerjaan serta mengarahkan dan mengontrol sehingga apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik.

Pengelolaan pada suatu organisasi dapat mempergunakan cara sebagaiberikut;

1. Merencanakan kebutuhan informasi sesuai dengan kebutuhan pimpinan, pengelola, pelaksana dan pemakai yang berwenang mengambil suatu keputusan.
2. Menyediakan bahan – bahan yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diinginkan diicipai.
3. memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan serta dilakukan secara efisien dan efektif.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas dan pelaksana dalam bidang pengelolaan.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses dan hasil pelaksanaan lapangan.
6. Melaksanakan tertib pengelolaan yang lancar dan terarah serta tepat waktu.

Berbagai kebijaksanaan yang dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan adalah : (1) Fungsionalisasi, (2) Keterpaduan, (3) Profesionalisme, (4) Mutu dan kualitas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang didalamnya terdiri dari berbagai unsure yang satu sama lain saling mempengaruhi, baik antara pimpinan maupun anggotanya, maupun antar sesama anggota dengan harapan agar apa yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk dapat mendukung antara satu dengan yang lainnya, agar proses kerja yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, terarah dan tepat waktu sehingga tepatlah bahwa pengelolaan pajak dan retribusi merupakan suatu cara terbaik untuk dapat menghimpun, mengatur dan mengelola berbagai potensi pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan PAD.

3. Pengertian Manajemen.

Dalam organisasi pemerintah maupun swasta manajemen mempunyai peranan yang penting sebagai pedoman untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka, Terry (1963) mengemukakan bahwa manajemen adalah mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui usaha orang lain. Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya manajemen adalah suatu proses kegiatan atau usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang – orang lain.

Dari pengertian manajemen tersebut terdapat pula fungsi – fungsi manajemen yang senantiasa dibutuhkan oleh organisasi pemerintah maupun swasta sebelum melaksanakan berbagai aktivitas atau tujuan dari organisasi tersebut maka, menurut pendapat Siagian (1987) ada beberapa fungsi manajemen yaitu : Planning, Organizing, Motivating, Controlling dan Evaluating.

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka dari beberapa fungsi manajemen tersebut yang terpenting antara lain :

a.1 Perencanaan (Planning).

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari fungsi – fungsi manajemen lainnya oleh karena itu harus didudukan pada porsi yang sebenarnya, karena apabila fungsi ini rusak dapat mempengaruhi fungsi lainnya. Fungsi perencanaan merupakan fungsi pokok dan sangat menentukan keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk lebih memberikan gambaran yang lebih relevan dengan permasalahan penelitian, maka terlebih dahulu penulis mengutip definisi perencanaan menurut Farland (1981) adalah memutuskan tujuan berdasarkan ramalan yang terjadi dalam waktu yang akan datang (forecasting = melihat kedepan). Di

dalam Forecasting dipertimbangkan tentang apa yang terjadi (Kecendrungan /Trends) perubahan/ change dan masalah – masalah pada waktu yang akan datang itu.

Sehubungan dengan definisi tersebut diatas, Gullick (1981) mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu perincian dalam garis besar, untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud/tujuan badan usaha itu.

Dengan demikian perencanaan adalah penentuan suatu serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Seirama dengan pendapat tersebut diatas Winardi (1986) mengatakan bahwa : setiap perusahaan yang ingin bertahan, tumbuh ataupun yang menginginkan bekerjanya perusahaan secara lancar memerlukan adanya perencanaan. Memang harus diakui pada abad modern ini dimana macam – macam tugas semakin kompleks, lebih banyak teknologi yang terpaut informasi turut berpartisipasi dalam pekerjaan yang akan datang dan dengan diversitas produk- produk serta jasa – jasa yang bertambah banyak, maka perencanaan menjadi suatu keharusan.

Peranan perencanaan dalam hubungannya dengan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Ambon. Bertitik tolak pada uraian – uraian terdahulu, dalam penulisan ini, maka dapat dikatakan bahwa lancar tidaknya serta tinggi rendahnya pemungutan retribusi parkir ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada pengguna parkir yang mempunyai kaitan erat dengan sumber daya manusia dalam penerapan rencana – rencana yang baik dan efektif.

Sehubungan dengan uraian di atas Warsito (1986) mengatakan bahwa : Setiap kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan memerlukan suatu perencanaan yang dapat berhasil tanpa didahului dengan perencanaan yang tepat, tujuan efisien, tanpa

perencanaan, jalannya suatu akan bersifat sekedar merupakan pilihan sesat yang sempit.

Menelusuri pendapat tertulis diatas, maka peranan fungsi perencanaan dalam meningkatkan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Ambon mempunyai arti yang sangat penting.

b. Proses Penyusunan rencana.

1. Faktor Manusia.

Manusia berbeda dengan makhluk lain ciptaan Tuhan. Disamping memiliki naluri (Instincts), manusia memiliki cipta, karsa dan rasa. Secara garis besar manusia pada dasarnya berkeinginan memenuhi kebutuhan yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomis.

Dalam memenuhi kebutuhan ini, manusia selalu merasa tidak puas, ingin selalu mencapai yang lebih dengan segala daya upaya dan kemampuannya. Hal ini mendorong manusia untuk berbuat dan selalu menginginkan perubahan yang lebih baik. Dalam hal yang demikian, upaya dan usaha tersebut melalui administrasi, organisasi, manajemen dan kepemimpinan harus melalui manusianya yang baik pula.

Faktor manusia memainkan peran penting, ia sebagai pemikir, peencana dan sekaligus pelaksana. Dalam pembangunan disebut manusia itu adalah objek pembangunan, sehingga memperbaiki manusia itu dapat melalui pelbagai macam upaya antara lain : (a) melalui pendidikan formal maupun informal, latihan – latihan (b) melalui situasi lingkungan fisik, social budaya (c) memenuhi kebutuhan dan motivasinya. Dengan perkataan lain harus meningkatkan administrative behavior dari mereka yang terlibat dalam perencanaan, keteladanan dan system pengawasan yang lues sesuai dengan ketentuan yang berlakudari pihak pimpinan atau atasan.

2. Faktor Organisasi dan kelembagaan .

Organisasi sebagai suatu system merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain berusaha mencapai tujuan yang tetentu. suatu oganisasi yang dapat bertahan dan berkembang terus apabila dapat memberikan respon (tanggap) terhadap perubahan – perubahan. Agar dapat kedap dan bertahan terhadap p[erubahan maka diperlukan perencanaan yang matang .

Untuk menyusun perencanaan yang matang dan baik diperlukan data dan informasi yang baik pula dalam mendukung perencanaan tersebut. Mengingat pentingnya fungsi perencanaan dalam suatu organisasi, maka bentuk perencanaan diperlukan suatu wadah sesuai dengan fungsi dan urgensinya. Jadi dalam hal ini fakto organisasi dan kelembagaan akan berpengaruh pula dalam perencanaan.

3. Penyusunan perencanaan.

Diatas telah disebutkan bahwa faktor manusia (perencana) khususnya, organisasi dan kelembagaan sangat me nentukan dalam penyusunan perencanaan. Penyebab kegagalan suatu perencanaan tidak terlepas dari factor perencana ini, karena perencana sering kali atau sengaja mengabaikan prosedur penyususnan perencanaan.

Proses penyusunan perencanaan pada umumnya dapat dilihat sebagai berikut :

a. pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data ini di pro ses permulaan penyusunan perencanaan, data perlu di seleksi untuk di identifikasi, data harus dipercaya dan data ini pada dasarnya masih merupakan data mentah yang perlu proses sedemikian rupa sehingga data merupakan informasi yang berguna bai penyusun perencanaan.

b. Penilaian .

Penilaian disini dimaksudkan sebagai meneliti dan meninjau kembali segala usaha baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Apabila Usaha Atau kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik, apakah telah sesuai dengan rencana, apakah telah memenuhi sasaran , apakah ada kaitan dengan setiap langkah yang diambil satu dengan yang lain. Kekurangan dan kelemahan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap sasaran dan tujuan yang hendak dicapai baik kualitas maupun kuantitas. Mungkin juga dapat disebabkan oleh kelemahan di bidang pengolahan dalam bidang pelaksanaannya. Tak ukur dalam penilaian ini tidak jauh dari usaha pencapaian tujuan itu sendiri dan biasanya ditekankan kepada tujuan yang hendak dicapai, hasil guna dan daya guna.

c. Perumusan kebijakan .

dari langkah kedua apabila terdapat kekurangan dan kelemahan diperlukan perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu maka setiap perencana harus menyadari perubahan dan perbaikannya dalam rangka penyempurnaan dan pencapaian tujuan sesuai dengan kebijaksanaan atas dasar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Kebutuhan masa depan.

Kebutuhan masa depan berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan dan disahkan. Perencana harus menjabarkan kebijaksanaan tersebut secara operasional terurai yang meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

e. Pembiayaan.

Dalam pembiayaan ini diperlukan pula untuk menyusun rencana pembiayaan baik untuk program maupun untuk proyek. Dalam penyusunan pembiayaan ini tidak dapat melepaskan pembiayaan tahun – tahun sebelumnya, begitu pula dalam memperhitungkan pembiayaan dimasa depan. Jadi dalam hal ini

pembiayaan penyusunan pembiayaan dalam melakukan perhitungan memperhatikan keadaan sebelumnya , masa sekarang dan perkiraan di masa mendatang. Penyusunan perhitungan pembiayaan didasarkan kepada kebutuhan, bukan berdasarkan kemauan. Dalam penyusunan pembiayaan diperhatikan pula satuan harga pokok dan standarisasi harga yang mempengaruhi tendensi setiap tahun mengalami perubahan.

f. Pemantauan target sasaran.

1. Penentuan target.

Penyusunan pembiayaan, merupakan anggaran biaya berdasarkan permintaan (demand) dan bukan berdasarkan anggaran biaya yang tersedia (supply). Untuk menentukan target setiap program dan proyek perlu anggaran biaya yang tersedia. Dengan sendirinya rencana biaya yang telah disusun perlu ditinjau kembali dan dengan sendirinya disesuaikan dengan anggaran biaya yang ada (tersedia). Dalam hal ini pemilihan prioritas sangat diperlukan , mana yang harus segera dilaksanakan, mana yang harus ditunda pelaksanaannya.

2. Penetapan sasaran.

Penetapan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai jalan yang didasarkan kepada (a) Kebijakan pemerintah, (b) Prioritas tujuan, (c) besarnya biaya yang tersedia. Selain dari pada penetapan sasaran diperlukan pula pemilihan sasaran, pemilihan sasaran sebelumnya ada kebijakan pemerintah secara pasti. Yang perlu diperhatikan bagi perencana antara lain adalah : (1) menyusun berbagai pilihan (alternatif) kegiatan untuk pencapaian tujuan, (2) pemilihan mana yang paling layak dan dapat mencapai tujuan secara maksimal.

g. Formulasi perencanaan.

Adapun kegunaan perencanaan adalah : (1) menyajikan sekumpulan keputusan untuk petugas – petugas yang berwenang dan selanjutnya untuk

dilaksanakan., (2) menyediakan kerangka kerja untuk dilaksanakan bagi pelaksana program dan proyek yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya target yang tercantum dalam keputusan tersebut.

h. Implementasi Proyek.

Pelaksanaan proyek baru dapat dikerjakan apabila apabila seluruh langkah – langkah seperti diuraikan diatas sudah dilakukan. Apabila langkah – langkah tersebut telah ditempuh maka dimulai pengerjaan proyek itu.

i. Evaluasi dan pemantauan.

Sementara rencana itu berjalan, dilakkan proyek dan pemantauan pelaksanaan proiyek dilakukan secara terus menerus dan didalam setiap tahapan pelaksanaan. Kegiatan penilaian dan pemantauan dapat berupa laporan tahunan, laporeabn tiga bulanan, laporabnm dalam bentuk lain yang relevan.

m. Revisi dan penyusunan kembali rencana.

Dari penelaan dan penilaian dari pelbagai kegiatan dan tahapan perencanaan yang harus dikerjakan sehingga mendapatkan masukan dan balikan yang dapat menjadi pertimbangan dan penyusunan kembali rencana. Dengan demikianb jenjang dan tahapan kegiatan penyusunan perencanaan harus diulang kembali sejak semula. Walaupun demikian terjadi revisi kegiatan proyek itu sama sekali tidak boleh berhenti dan harus berjalan terus.

b. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah baian dari mekanisme system dari sebuah mata rantai yan mempunyai peranan tertent, maka apabila pengawasan diterapkan secara salah bakal menghasilkan dampak yang negative terhadap system amata rantai yang

terkait sehingga harus lebih dulu menyafari makna dari pengawasan serta dimana tempat dan kedudukannya. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan tanpa pemikiran yang matang bukannya ikut memperlancar pembangunan namun justru malah sebaliknya akan menghambat pembangunan itu sendiri.

Menyadari semakin pentingnya pengawasan ini maka para ahli manajemen menetapkan sebagai salah satu fungsi organik dari manajemen dengan harapan bahwa untuk setiap organisasi mutlak dijalankan fungsi manajemen di mana fungsi pengawasan bukanlah ditunjukan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah, akan tetapi tujuan utama dari fungsi pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan yang akan datang. Pengawasan juga bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk menjadikan seseorang gelisah tetapi pengawasan diperlukan untuk memahami apa yang salah agar diperbaiki di masa yang akan datang dan dimaksudkan agar segala perencanaan berjalan dengan lancar.

Selain itu Terry (1991) mendefinisikan secara sederhana tentang pengawasan sebagai berikut : proses mendeterminir apa yang harus dilaksanakan, mengevaluir pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan – tindakan korektif sedemikian rupa sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana – rencana.

Dari pengertian ini dapat dikaji dan ditarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan sehingga dapat dikatakan bahwa, perencanaan dan pengawasan bagai dua sisi mata uang, karena perencanaan tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan.

Pendapat senada dikatakan pula oleh Siagian(1989) bahwa pengawasan adalah Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Pentingnya pengawasan.

Pengawasan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Apabila terjadi penyimpangan – penyimpangan atau persoalan – persoalan dapat diketahui sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut bila dibandingkan dengan perkiraan semula.

Seandainya setiap orang menyadari bahwa setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik, maka sebenarnya tidak diperlukan adanya pengawasan, tetapi jarang sekali terjadi sesuatu dapat berjalan dengan baik, karena kebanyakan rencana itu dibuat oleh manusia dan manusia itu berbeda – beda dalam kemampuan, motivasi dan kejujurannya.

Kenyataan ini dapat dilihat pada teori mengenai watak manusia yang dikemukakan Gregor (1987) yang terkenal dengan teori “ X “ yang intinya adalah bahwa sebagian manusia tidak menyukai pekerjaan dan juga ada kesempatan untuk menolak pekerjaan itu. Oleh karena itu mereka harus dilibatkan, diarahkan, diawasi dan didorong dalam menjalankan pekerjaan demi pencapaian tujuan organisasi yang telah digariskan dengan memberikan berbagai sanksi hukum. Demikian juga banyak orang yang suka menghindari pekerjaan dan rasa aman atas segala- galanya.

Atas pertimbangan itulah pengawasan tidak hanya berlaku untuk organisasi besar saja, tetapi juga untuk organisasi kecil, serta untuk pengawasan terhadap setiap tugas yang diberikan (baik tugas yang besar maupun tugas yang kecil). Pengawasan juga merupakan salah satu tugas dari seorang pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan – pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Rencana betapapun banyaknya akan gagal sama sekali bilamana tidak diikuti dengan tindakan pengawasan. Untuk itu seorang pimpinan diharapkan mampu mengusahakan agar pekerjaan – pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan lewat kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian, dan pelbagai tindakan yang sejenisnya bahkan bila perlu mengatur dan mencegah sebelum adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2. Tujuan pengawasan.

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah kegiatan tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan. Apakah terjadi penyimpangan, dimana terjadinya dan bagaimana tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

Tujuan pengawasan yang lain adalah untuk mengetahui samai seberapa jauhkah atau tingkat penyelesaian dari kegiatan itu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Disamping itu berusaha untuk mengetahui dan menghindari kemungkinan kesalahan di kemudian hari serta mencari upaya – upaya untuk mencegahnya.

Fayol (1989) menyatakan bahwa dalam suatu usaha pengawasan yang dilaksanakan ialah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang diberikan dan prinsip yang telah ditentukan.

Tujuan pengawasan adalah untuk menemukan kelemahan dan kesalahan untuk dibetulkan dan mencegah penanggulangannya, pengawasan dioperasiukan terhadap semua hal, benda, oreang serta kegiatan.

3. Cara- cara pengawasan.

Di dalam melaksanakan pengawasan ada berbagai cara yang digunakan namun menurut Soekarno (1995) bahwa ada 4 cara pengawasan yaitu : (1) pengawasan atau pengendalian intern, (2) pengawasan atau pengendalian ekstern, (3) pengawasan atau pengendalian formal dan (4) pengawasan atau pengendalian formal. Dimana pengawasan atau pengendalian intern biasanya pengawasan atau pengendalian ini dilakukan oleh kepala bagian/ kepala sub bagian terhadap kolega – kolega yang ada dibawah pimpinannya atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas pada organisasi atau pengendalian sekstern. Sedangkan pengawasan atau pengendalian ekstern yaitu pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu instansi tertentu. Selanjutnya pengawasan atau pengendalian formal ini dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang yang dapat dilakukan secara intern maupun ekstern misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengadakan pengawasan terhadap setiap lembaga Negara atau pemerintah yang menyangkut pertanggung jawaban keuangan dan harta kekayaan milik Negara sedangkan dibidang swasta pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris.

Pengawasan atau pengendalian formal ini dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung . misalnya melalui surat kabar, majalah dan sebagainya dimana dalam alam demokrasi masyarakat diberi kesempatan untuk mengawasi sehingga pengawasan dan pengendalian melalui dan oleh masyarakat yang biasanya disebut kendali social (Control social). Apabila ditinjau dari segi perjangkaan maka pengawasan atau pengendalian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : (a) secara prefentif, dalam hal ini pengawasan atau

pengendalian dilakukan sebelum terjadinya sesuatu tindakan, ini dimaksudkan agar menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.(b) Secara represif, dalam hal ini pengawasan atau pengendalian dilakukan setelah terjadinya sesuatu tindakan, dimaksudkan untuk mengetahui secara dini serta secara dini juga dsiadakan perbaikan.

Denganh demikian jika timbul masalah dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diambil pemecahan secara cepat dan tepat seras antisipasi kedepan untuk mencegah terulang kembalinya dimasa datang.

C. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu kemampuan otonomi daerah adalah kemampuan pengelolaan dan pengadaan sumber – sumber keuangan daerah. Bahkan dapat di katakan bahwa hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang dapat berlangsung tanpa dukungan sumber – sumber keuangan yang memadai. Aspek keuangan daerah merupakan factor yang sangat substansial bagi terselenggaranya otonomi daerah, sebab factor keuangan adalah alat utama dalam dinamika pengelolaan pembangunan daerah.

Josef Piwu Kaho dalam Rahardjo Adisasmita (2006 : 95) berpendapat bahwa salah satu criteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *Self supporting* dalam bidang keuangan . Dengan perkataan lain Faktor keuangan merupakan factor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya factor keuangan daerah lebih dominant dibandingkan dengan factor – factor lainnya.

Selanjutnya Wajong dalam Rahardjo Adisasmita mengemukakan juga bahwa uang adalah alat untuk mengukur barang dan jasa, alat untuk mengukur menukar barang dan jasa dan alat penabung. Selain sebagai alat pengukur, penakar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga. Keadaan keuangan daerah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan – kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Soetrisno (1989 :45) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber – sumber pendapatan , baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah maupun sumber – sumber pendapatan lainnya.

Selanjutnya juga dikatakan Juoro (1996: 2) mengatakan pula bahwa sumber pendapatan asli daerah dibagi dalam 4 bagian yakni : (a) Pendapatan asli yang terbagi atas pajak daerah, retribusi daerah laba BUMN dan dinas – dinas , (b) bagi hasil pajak dan bukan pajak, (c) Sumbangan dan bantuan dan (4) penerimaan pembangunan terdiri atas perusahaan daerah dan BUMD.

Jadi untuk meningkatkan kemampnan pendapatan asli daerah telah dilaksanakan melalui berbagai kebijaksanaan ,antara lain menyangkut peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pendanaan daerah, dengan upaya memobilisasi sumber – sumber dana ,disamping upaya menggali pengembangan kelembagaan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah telh dialokasikan pada berbagai subsidi daerah otonom untuk keperluan belanja rutin serta program –program bantuan inpres untuk keperluan belanja pembangunan daerah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya :

- a. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Adanya dorongan dari pihak pemerintah untuk menggali berbagai sumber – sumber pendapatan asli daerah yang ada di daerah.
- c. Membuka hubungan kemitraan dengan berbagai pihak utamanya sector swasta.

Sujanto (1990: 120), mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan bagian dari pendapatan nasional yang bersumber dari daerah, yang pengelolaannya oleh pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah suatu kabupaten meliputi : (1). sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) dana perimbangan yang sah, meskipun proporsi PAD terhadap total pendapatan adalah sangat kecil (kurang dari 10 persen), namun penerimaan PAD itu penting karena merupakan hasil pemungutan dan sumber – sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah kota/kabupaten sendiri.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Hasil Pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain laba,dividen,dan penjualan saham milik daerah).

Pengelolaan pendapatan daerah agar dilakukan secara optimal, untuk itu diarahkan pada upaya – upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pemungutan (*coverage ratio*) yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk dipungut dibandingkan potensi wajib pajak yang sebenarnya yang terdapat di daerah kota/kabupaten, artinya penentuan target penerimaan pajak daerah diupayakan mendekati potensi masing – masing.
2. Intesifikasi sumber – sumber yang ada meliputi antara lain :
 - a. Melakukan pendataan secara maksimal dan akurat tentang semua objek dan subjek daerah dan retribusi daerah.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat pengelola secara profesional.
 - c. Meningkatkan koordinasi anantara Dinas /Instansi terkait dengan lebih baik.
 - d. Meningkatkan saran dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas aparat pengelola.
 - e. Meningkatkan pengawasan dengan lebih baik untuk meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Ekstensifikasi yaitu menambah sumber penerimaan pendapatan selain dari sumber –sumber yang sudah ada yang meliputi upaya – upaya antara lain :

- a. Mencari sumber pendapatan yang baru yang mempunyai potensi besar.
- b. Meminta kewenangan mengelola sumber pendapatan/pembiayaan dari pusat (sebagai wujud ekonomi yang luas).
- c. Penerbitan perda-perda baru sesuai dengan sumbernya.

Selanjutnya menurut pendapat Rahardjo Adisasmita (2006: 92) bahwa arah pengelolaan belanja daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, politik sosial dan budaya. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapabilitasnya ,yaitu kemampuan untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan secara efektif dan efisien melalui anggaran kinerja.

Pelaksanaan anggaran kinerja membutuhkan perencanaan pengeluaran dan pengelolaan anggaran daerah. Dalam Hubungan initerdapat enam prinsip dasar atau pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran kepada unit kerja (Dinas Daerah) dan antara jenis pengeluaran didalam unit kerja, yaitu :

1. Kriteria utama dalam pemeliharaan program yang akan disediakan dan dibelanjakan adalah ada tidaknya mengandung kegagalan dalam pelaksanaannya .
2. Jumlah pengeluaran agregat keseluruhan (total) dari semua unit kerja harus selaras dengan kerangka kebijakan makro ekonomi.

3. Arah pengelolaan anggaran antar unit kerja dan dalam berbagai jenis pengeluaran di dalam suatu unit kerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Implikasi dari program –program kunci dari pada kelompok miskin harus di analisis secara baik
5. Alokasi dana untuk belanja rutin dan pembangunan yang ada dalam tiap program dan sektor harus di analisis secara integratif.
6. Lembaga – lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus terus dievaluasi untuk meningkatkan ;
 - a) Tingkat efisiensi dari daftar skala prioritas yang diajukan setiap unit kerja.
 - b) Efisiensi teknis dalam penggunaan dana yang dianggarkan.

D.. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas menunjukkan kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang direncanakan baik kuantitas maupun kualitas. Efektivitas merupakan suatu konsep strategi bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien ,baik dilihat dari segi input dari segi output.

Menurut Westa dalam Batinggi dkk,(1992:5) kata *efektif* berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara efisien sudah tentu akan efektif ,karena dilihat dari segi hasil ,tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai. Seabliknya pekerjaan yang efektif belum tentu efisien ,karena hasil dapat saja tercapai, tetapi mungkin menggunakan sumber daya yang berlebihan yang tidak sesuai dengan

rencana sebelumnya. Pendapat lain juga dikatakan bahwa suatu kekuatan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Selanjutnya menurut Barnard & Gibson (1993: 27) prinsip suatu organisasi formal merupakan system yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan inti social yang paling efektif, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran .Pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama diartikan sebagai efektifitas. Tingkat pencapaian itu menunjukkan tingkat efektifitas. Dengan demikian efektifitas organisasi diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Etzioni (1985: 12)

Pendekatan sasaran dalam pengukurannya dimulai dengan mengidentifikasi sasaran dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Ukuran keberhasilan organisasi dapat dilihat dari faktor efisiensi, produktivitas, tingkat keuntungan, pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi, stabilitas organisasi, dan kesejahteraan anggota organisasi.

Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi (kesehatan) dan organisasi internal. Indikator untuk mengukur pendekatan ini diantaranya, adalah efisiensi, perhatian atasan terhadap karyawan, semangat, kerjasama, dan loyalitas kelompok kerja, saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pemimpin , desentralisasi dan pengambilan keputusan, adanya komunikasi vertical dan horizontal yang lancar dalam organisasi, adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, adanya system imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok – kelompok kerja yang efektif , dan organisasi dan bagian – bagian bekerjasama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu kepada kepentingan bersama.

Konsep diatas menunjukkan bahwa efektifitas ditentukan oleh beberapa besar tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai hasil kinerja yang ditampilkan oleh individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Bahkan menurut Indra Wijaya (1989 : 36) mengidentifikasi efektivitas organisasi sama dengan keseluruhan orang yang ada dalam organisasi. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektifitas sebagaimana diungkapkan oleh Gibson,(1993:27) disebut sebagai pendekatan tujuan (*the goal approach*). Sejalan dengan hal tersebut, Lubis dan Huseini (1987 : 98), efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran. Konsep efektivitas biasanya selalu terkait dengan konsep efisiensi, yaitu suatu proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi yang menunjukkan banyaknya input terhadap output. Menurut Lubis dan Huseini, terdapat pendekatan dalam pengukuran efektivitas yaitu :

1. Pendekatan sasaran (*goal approach*) dimana pusat perhatian pada output adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.
2. Pendekatan Sumber (*resources approach*) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini lebih mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Pendekatan proses (*proces approach*) adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme kerja organisasi.
4. Pendekatan Integratif (*integrative approach*) yaitu suatu pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output.

Selain pendekatan tujuan Gibson (1993: 28-29), juga mempergunakan pendekatan sistem. Teori sistem menyimpulkan dua kriteria pokok yaitu (1) efektivitas harus menggambarkan hubungan seluruh siklus input–output proses dan (2) efektivitas harus menggambarkan hubungantimbal balik antara organisasi dalam lingkungan tempat hidupnya organisasi.

Pendekatan sistem menyimpulkan kriteria efektivitas, tidak hanya dilihat dari tingkat pencapaian tujuan /ouput semata. Tetapi secara lebih luas memperhitungkan mekanisme berfungsinya komponen- komponen sistem yaitu Input–output proses dan hubungan timbal balik antara komponen tersebut serta bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan lingkungannya. Kriteria efektivitas dari segi input menyangkut seberapa besar organisasi memperoleh sumber daya dari lingkungannya. Dari sisi komponen proses efektivitas dilihat dari sejauhmana berfungsinya mekanisme kerja organisasi dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas secara optimal melalui prinsipdan mekanisme manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi, dan pengendalian serta pengawasan. Dari sisi output criteria efektivitas ditunjukkan berdasarkn tujuan /sasaran sebagaimana dijelaskan di atas.

Gibson selanjutnya mengadakan pengukurun efektivitas dengan mempertimbangkan factor produksi (*production*), efesiensi (*efficiency*), kepuasan (*satisfaction*), adaptasi(*adaptiveness*) dan perkembangan (*development*). Namun sebelumnya Desler (1980) serta Jacson dan Margan (1982) telah menawarkan empat indikator lainnya, yakni adaptibilitas, kohesi dan kemampuan mengontrol lingkungan.

Sinungan (1987: 12) konsep efektivitas adalah : (1) berkaitan dengan hubungan antara teori –teori organisasi yang modern maupun klasik tentang output dan input, (2) Perbandingan/tingkatan dimana sasaran yang dikemukakan dapat

dianggap tercapai, (3) efektivitas eksternal atau perbandingan antara evaluasi lingkungan suatu unit output dan evaluasi suatu unit input (masukan), dan (4) kemampuan system untuk tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan - tujuan khusus yang akan dicapai.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan bagaimana sasaran organisasi dapat dicapai, oleh karena itu dalam hubungannya dengan penelitian ini yang dimaksud dengan sasaran organisasi adalah bagaimana organisasi Dinas perhubungan Kota dapat mencapai sasaran berupa pengelolaan retribusi Perparkiran yang lebih baik serta dapat berlangsung secara optimal untuk mencapai target realisasi retribusi Parkir.

E. Kerangka Pikir.

Otonomi Daerah adalah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri atau daerah yang memiliki pemerintah sendiri yang berdaulat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber – sumber daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

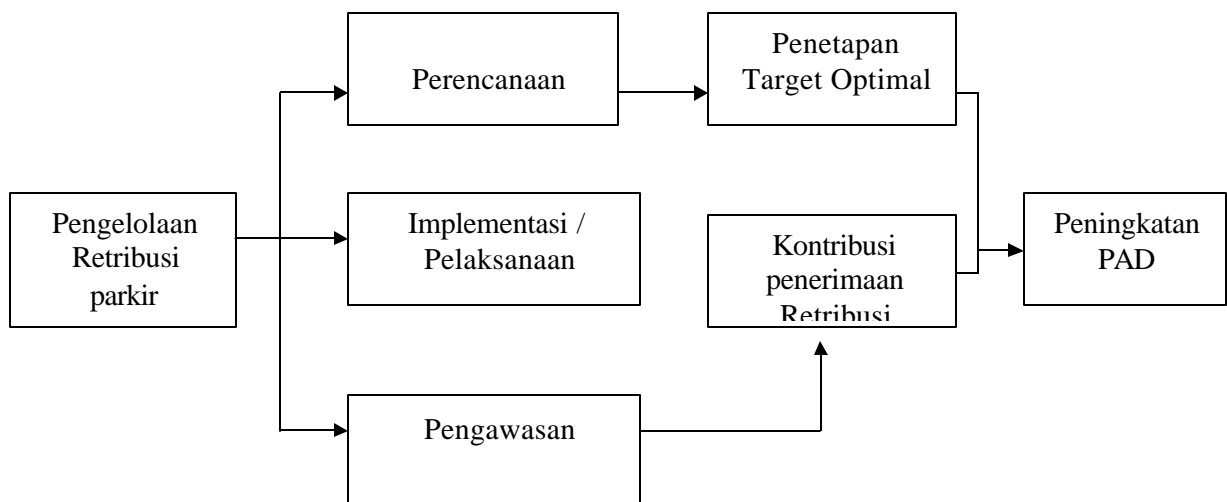
Pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah yang sangat penting karena merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonominya. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Badan usaha Milik Negara atau daerah pajak, retribusi dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sesuai peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah bahwa terdapat 40 retribusi daerah . Retribusi parkir yang dapat menjadi objek tulisan ini adalah iuran kepada pemerintah kota Ambon yang timbul karena adanya jasa

yang diberikan oleh pemerintah kota Ambon kepada masyarakat berupa pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kota Ambon

Kerangka pikir yang dimaksud disini mengarah pada suatu bentuk pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam rangka peningkatan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat ditentukan oleh , kemampuan pengelolaan, perencanaan, implementasi, dan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan retribusi parkir. Pendapatan potensi retribusi parkir, selain melihat jumlah kendaraan ,juga waktu dan lokasi pemungutan retribusi perlu mendapat perhatian dengan demikian dapat ditetapkan target yang optimal, sementara kemampuan petugas parkir dilapangan sangat terkait kepada aktivitas pelayanan parkir seperti pemungutan dan pengaturan parkir serta motivasi kerja. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan penerimaan retribusi yang maksimal dengan biaya operasional yang minimal.

Keadaan tersebut diatas juga harus didukung dengan kegiatan pengawasan atas pemungutan retribusi seperti penggunaan karcis, mekanisme penyetoran oleh pengelola parkir dan waktu penyetoran. Jika keadaan tersebut berlangsung secara efektif dan efisien maka hal tersebut akan menghasilkan realisasi penerimaan retribusi parkir yang optimal dan dengan demikian akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah.



D. Hipotesis.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka Hipotesis dapat diajukan sebagai berikut :

Semakin efektif pengelolaan dan pengawasan pemungutan retribusi perparkiran di tepi jalan umum , semakin tinggi jumlah penerimaan retribusi perparkiran dan semakin tinggi tingkat kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.